



Persepsi Masyarakat Barru, Soppeng, Wajo, dan Sidrap Terhadap Gerakan Abdul Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan

Mutmainnah Rusli¹, Riskha Sudiarti², Risdayanti³, Jumriana⁴, Aswar⁵

^{1,2,3,4,5}Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

E-mail: mutmainnahrusli36@gmail.com¹, riskhasudiarti08@gmail.com²,
risdayantirisdayanti2@gmail.com³ jumrianariana758@gmail.com⁴, aswaraswar286@gmail.com⁵

Artikel History

Received: (13-05-2026)

Revised: (15-05-2026)

Accepted: (18-05-2026)

Keywords: Persepsi Masyarakat, Abdul Kahar Muzakkar, Antropologi Sejarah, Ingatan Kolektif, Sulawesi Selatan.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji persepsi masyarakat di empat kabupaten Sulawesi Selatan, yakni Barru, Soppeng, Wajo, dan Sidrap, terhadap Gerakan DI/TII yang dipimpin Abdul Kahar Muzakkar pada periode 1950–1965. Melalui metode sejarah lisan dan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat memiliki persepsi yang beragam. Sebagian memandang gerakan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan diskriminasi yang dialami putra daerah dalam tubuh militer dan pemerintahan pusat. Sebagian lain menyoroti cita-cita ideologis-keagamaan yang diusung, namun mengkritik metode kekerasan yang digunakan. Sementara itu, banyak masyarakat yang justru mengingat dampak negatif dari gerakan ini, seperti terror, pemerasan, pelarangan aktivitas ekonomi, serta trauma pengungsian yang berkepanjangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat Basowasidrap terhadap Abdul Kahar Muzakkar bersifat ambivalen dan sangat dipengaruhi oleh pengalaman langsung, ikatan kekerabatan, serta pewarisan memori antargenerasi.

PENDAHULUAN

Sejarah Indonesia setelah kemerdekaan tidak hanya diwarnai oleh perjuangan mempertahankan kedaulatan, tetapi juga berbagai pergolakan politik dan keamanan di daerah-daerah. Abdul Kahar Muzakkar merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah pergolakan di Indonesia setelah kemerdekaan. Ia lahir di Lanipa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, pada 24 Maret 1921. Sejak muda, Kahar dikenal aktif dalam organisasi dan pendidikan Islam. Pada masa pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan Indonesia, ia ikut terlibat dalam perjuangan melawan penjajah bersama para pejuang lainnya. Dalam masa revolusi fisik, Kahar Muzakkar menjadi salah satu tokoh yang memiliki pengaruh besar di Sulawesi Selatan karena kemampuannya memimpin pasukan gerilya dan membangun hubungan dekat dengan masyarakat pedesaan (Hamid, 2004) dan (Andaya, 1981). Secara historis, Abdul Kahar Muzakkar lahir di Lanipa, Luwu, Sulawesi Selatan pada tahun 1921. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ia aktif melawan penjajah Belanda dan pernah terlibat dalam berbagai gerakan militer Republik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Kahar Muzakkar memimpin Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) yang beranggotakan bekas pejuang lokal. Akan tetapi, setelah proses integrasi ke dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI), banyak pasukan gerilya Sulawesi Selatan yang tidak diterima secara penuh menjadi tentara resmi.

Situasi ini menimbulkan kekecewaan besar bagi Kahar Muzakkar dan para pengikutnya. (Nasution, 1983)

Pada masa revolusi kemerdekaan 1945–1949, kondisi Sulawesi Selatan berada dalam situasi yang tidak stabil akibat konflik antara pejuang Indonesia dengan tentara Belanda yang datang kembali bersama NICA. Banyak rakyat Sulawesi Selatan membentuk laskar perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satu kekuatan penting saat itu adalah Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) yang dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakkar. KGSS berisi para bekas pejuang rakyat yang bergerak di pedalaman Sulawesi Selatan untuk melawan Belanda. Kelompok gerilya daerah seperti KGSS memiliki peranan besar dalam mempertahankan wilayah Indonesia dari upaya Belanda untuk kembali berkuasa setelah Proklamasi Kemerdekaan (Kahin, 1952).

Salah satu peristiwa penting yang terjadi di Sulawesi Selatan adalah gerakan yang dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakkar. Tokoh ini dikenal sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar sekaligus menimbulkan kontroversi dalam perjalanan sejarah Indonesia. Di satu sisi, ia dianggap sebagai pejuang yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat, tetapi di sisi lain ia juga dicatat sebagai pemimpin pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), pada periode 1950–1965 banyak pergolakan politik dan gerakan pemberontakan di beberapa daerah. Salah satu gerakan yang paling besar pengaruhnya di Sulawesi Selatan adalah pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Gerakan ini berlangsung lebih dari sepuluh tahun, melibatkan banyak pasukan, menimbulkan korban dari kalangan masyarakat maupun tentara, serta mengganggu kondisi sosial, ekonomi, dan keamanan di Sulawesi Selatan (Amini, 2024).

Pada tahun 1952, Kahar Muzakkar resmi bergabung dengan gerakan DI/TII yang dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo di Jawa Barat. Gerakan tersebut bertujuan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Setelah bergabung, Kahar Muzakkar mulai menerapkan sistem pemerintahan berbasis Islam di beberapa wilayah pedalaman Sulawesi Selatan. Ia membangun struktur pemerintahan sendiri, membentuk pasukan bersenjata, dan mengatur kehidupan sosial masyarakat berdasarkan syariat Islam (Noer, 1987). Gerakan ini mendapat dukungan dari sebagian masyarakat pedesaan yang merasa dekat dengan perjuangan Kahar Muzakkar dan kecewa terhadap kondisi ekonomi serta kebijakan pemerintah saat itu.

Walaupun demikian, gerakan DI/TII Kahar Muzakkar juga menimbulkan dampak sosial yang besar bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Konflik bersenjata antara pasukan DI/TII dan TNI berlangsung selama lebih dari satu dekade dan menyebabkan banyak korban jiwa, perpindahan penduduk, serta ketidakstabilan keamanan di berbagai daerah seperti Bone, Wajo, Soppeng, Sidrap, dan Luwu (Crouch, 1978). Banyak masyarakat hidup dalam ketakutan akibat operasi militer, perampasan bahan makanan, dan peperangan yang terus berlangsung. Oleh sebab itu, sebagian masyarakat memandang Kahar Muzakkar sebagai tokoh pemberontak yang membawa penderitaan bagi rakyat.

Dalam perkembangannya, gerakan DI/TII mendapat dukungan dari sebagian masyarakat pedesaan. Dukungan tersebut muncul karena masyarakat melihat Kahar Muzakkar sebagai tokoh yang memperjuangkan kepentingan daerah dan membela para mantan pejuang yang diabaikan pemerintah pusat. Hubungan sosial yang dekat antara pasukan gerilya dan masyarakat desa membuat gerakan ini cukup kuat di wilayah pedalaman. Namun di sisi lain, banyak masyarakat yang merasa dirugikan akibat konflik berkepanjangan. Aktivitas ekonomi terganggu, hasil pertanian sering dirampas, dan keamanan desa menjadi tidak stabil (Abdullah, Sejarah lokal di Indonesia, 1990); (Rasjid, 1999).

Gerakan Kahar Muzakkar tidak hanya bergerak di bidang militer, tetapi juga membangun sistem pemerintahan sendiri berdasarkan konsep Negara Islam Indonesia. Ia membentuk struktur pemerintahan, sistem perpajakan, organisasi pemuda, hingga aturan sosial yang berlandaskan syariat Islam. Dalam beberapa wilayah, masyarakat diwajibkan mengikuti aturan yang dibuat oleh DI/TII. Menurut Taufik Abdullah (1987), gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan berkembang menjadi gerakan sosial dan keagamaan yang mencoba membangun tatanan masyarakat baru sesuai dengan pemahaman Islam yang mereka yakini.

Persepsi masyarakat terhadap Kahar Muzakkar pada dasarnya dipengaruhi oleh pengalaman sejarah masing-masing kelompok masyarakat. Masyarakat yang keluarganya pernah bergabung atau mendukung DI/TII cenderung melihat Kahar Muzakkar sebagai pahlawan dan pejuang Islam. Mereka menilai bahwa perjuangan Kahar Muzakkar merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan pemerintah pusat terhadap masyarakat Sulawesi Selatan (Druce S. C., 2020). Sebaliknya, masyarakat yang menjadi korban konflik bersenjata biasanya memiliki pandangan negatif terhadap gerakan tersebut karena dianggap menyebabkan kerusakan sosial dan ekonomi.

Dalam perspektif antropologi sejarah, gerakan Kahar Muzakkar tidak dapat dipahami hanya sebagai pemberontakan politik semata, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan. Nilai budaya Bugis-Makassar seperti *siri'*, loyalitas kelompok, keberanian, dan solidaritas sosial turut mempengaruhi kuatnya dukungan masyarakat terhadap gerakan Kahar Muzakkar (Pelras, 1996). Faktor identitas budaya ini membuat gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan memiliki karakter yang berbeda dibandingkan gerakan serupa di daerah lain di Indonesia.

Dalam sejarah, gerakan Kahar Muzakkar sering hanya dipandang sebagai pemberontakan Islam yang bertujuan mendirikan negara berdasarkan agama. Namun, berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa alasan di balik gerakan tersebut sebenarnya lebih rumit. Kahar Muzakkar adalah mantan pejuang yang sebelumnya setia kepada Republik Indonesia. Ia merasa kecewa kepada pemerintah pusat karena pasukan Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) yang dipimpinya tidak diterima sepenuhnya ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949 (Gonggong, 2004). Kekecewaan ini juga dirasakan oleh banyak pejuang lain yang merasa perjuangan mereka tidak dihargai.

Dalam budaya Bugis-Makassar, perlakuan seperti itu bukan hanya dianggap sebagai ketidakadilan, tetapi juga menyangkut *siri'*, yaitu harga diri, martabat, dan rasa malu. Nilai *siri'* memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat setempat. Kahar Muzakkar kemudian menggunakan rasa kecewa bersama itu sebagai dasar perjuangan, lalu menghubungkannya dengan ajaran Islam. Pada tahun 1952, ia resmi bergabung dengan gerakan Darul Islam yang dipimpin Kartosuwiryo di Jawa Barat, dan menyatakan Sulawesi Selatan sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia.

Selama masa pemberontakan, Kahar Muzakkar bersama pasukannya menguasai beberapa wilayah pedalaman, menjalankan perang gerilya, dan menerapkan aturan Islam secara ketat di daerah kekuasaannya. Akan tetapi, di balik tujuan ideologinya, konflik ini juga membawa dampak buruk bagi masyarakat sipil. Perempuan menjadi salah satu kelompok yang paling banyak mengalami ketidakadilan, tersisih, bahkan mengalami kekerasan selama konflik berlangsung. Namun, setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, hubungan Kahar Muzakkar dengan pemerintah pusat mulai memburuk. Hal ini disebabkan karena pasukan Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) yang dipimpinya tidak seluruhnya diterima masuk ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Keputusan tersebut menimbulkan kekecewaan besar, baik bagi Kahar maupun para pengikutnya. Dalam budaya Bugis-Makassar, persoalan harga diri

atau *siri*’ memiliki makna yang sangat penting. Karena itu, penolakan tersebut dianggap sebagai penghinaan terhadap perjuangan mereka (Sahajuddin, 2019).

Darul Islam dan Republik Indonesia secara ideologis memiliki tujuan untuk mendirikan negara baru yang modern serta menghapuskan unsur-unsur kuno dari masa lalu seperti feodalisme. Untuk mencapai hal tersebut, DI/TII menyerukan perlawanan terhadap adat istiadat dan keyakinan yang tidak sesuai dengan Islam. Sementara itu, Pemerintah Republik Indonesia mengembangkan retorika revolusi sebagai ideologi dominan negara baru tersebut dengan mengindonesiasikan infrastruktur kolonial, membangun sektor pertanian serta sistem pendidikan dan kesehatan, mendirikan media massa, dan membentuk tentara profesional.

Rasa kecewa itu kemudian berkembang menjadi gerakan perlawanan bersenjata. Pada tahun 1953, Abdul Kahar Muzakkar menyatakan bergabung dengan Darul Islam yang dipimpin Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo dan menjadikan Sulawesi Selatan sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia. Sejak saat itu, pengaruh gerakan Kahar Muzakkar menyebar ke berbagai wilayah di Sulawesi Selatan, termasuk Barru, Soppeng, Wajo, dan Sidenreng Rappang (Sidrap). Daerah-daerah tersebut menjadi jalur pergerakan pasukan, tempat persembunyian, wilayah dukungan masyarakat, hingga lokasi terjadinya bentrokan dengan TNI.

Di Kabupaten Barru, gerakan Kahar Muzakkar juga mendapat perhatian karena wilayah ini berada di jalur strategis antara Makassar dan Parepare. Beberapa daerah di Barru pernah menjadi tempat persembunyian pasukan DI/TII. Kehadiran kelompok ini menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat, tetapi ada pula sebagian warga yang memberikan simpati karena melihat perjuangan Kahar sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan.

Di Kabupaten Soppeng, pengaruh gerakan ini masuk ke daerah pedalaman seperti Lalabata dan Donri-Donri. Masyarakat setempat mengalami suasana tidak aman karena sering terjadi pengejaran dan pertempuran antara pasukan pemerintah dan kelompok Kahar Muzakkar. Banyak warga terpaksa mengungsi ke hutan atau pegunungan demi menyelamatkan diri. Kenangan tersebut masih tersimpan dalam ingatan masyarakat yang pernah hidup pada masa itu.

Sementara itu, di Kabupaten Wajo, terutama di wilayah Belawa, Majauleng, dan Gilireng, dukungan terhadap Kahar Muzakkar cukup kuat. Faktor budaya *siri*’, semangat keagamaan, dan banyaknya bekas anggota KGSS dari daerah ini menjadi alasan utama. Namun demikian, masyarakat umum banyak yang memilih bersikap netral karena takut terhadap konflik yang terjadi antara TNI dan pasukan Kahar Muzakkar.

Di Kabupaten Sidrap, wilayah yang menjadi jalur penghubung antara pedalaman dan pesisir ini sering digunakan sebagai jalur logistik serta tempat persinggahan pasukan DI/TII. Beberapa kecamatan tercatat rawan infiltrasi pemberontak pada akhir 1950-an hingga awal 1960-an. Ingatan masyarakat Sidrap terhadap Kahar Muzakkar diwariskan secara lisan, sehingga muncul beragam pandangan tentang dirinya, baik sebagai pemberontak maupun pejuang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji sejarah perkembangan dan peran Abdul Kahar Muzakkar di Barru, Soppeng, Wajo, dan Sidrap. Selain melihat pergerakan politik dan militernya, penelitian ini juga bertujuan memahami dampak sosial yang dirasakan masyarakat serta bagaimana sosok Kahar Muzakkar dikenang hingga sekarang. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Sulawesi Selatan.

Gerakan Kahar Muzakkar akhirnya berakhir setelah ia tewas dalam operasi militer pada tahun 1965 di wilayah Sulawesi Tenggara. Meskipun demikian, nama dan pengaruhnya masih terus hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Sulawesi Selatan. Hingga saat ini, masyarakat masih memperdebatkan apakah Kahar Muzakkar layak dianggap sebagai pahlawan daerah atau sebagai

pemberontak terhadap negara. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa sejarah Kahar Muzakkar bukan hanya persoalan politik, tetapi juga berkaitan dengan identitas, memori kolektif, dan pengalaman sosial masyarakat Sulawesi Selatan (Ricklefs, 2008).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan antropologi sejarah. Pendekatan antropologi sejarah digunakan karena penelitian ini berusaha memahami pandangan, pengalaman, serta cara masyarakat memaknai gerakan Abdul Kahar Muzakkar dalam kehidupan sosial dan budaya mereka. Penelitian ini tidak hanya melihat peristiwa sejarah sebagai fakta masa lalu, tetapi juga mencoba memahami bagaimana ingatan, cerita, dan pengalaman masyarakat diwariskan dari generasi ke generasi di wilayah Barru, Soppeng, Wajo, dan Sidrap.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan masyarakat yang dianggap mengetahui atau memiliki pengalaman terkait gerakan Abdul Kahar Muzakkar, baik dari cerita keluarga maupun pengalaman hidup pada masa tersebut. Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan observasi dan studi pustaka untuk memperkuat data yang diperoleh di lapangan. Observasi dilakukan dengan melihat kondisi sosial masyarakat serta bagaimana cerita mengenai gerakan tersebut masih dipahami hingga sekarang.

Dalam pendekatan antropologi, peneliti berusaha memahami sudut pandang masyarakat secara mendalam tanpa langsung menilai benar atau salahnya pandangan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menekankan pada makna sosial, nilai budaya, dan ingatan kolektif masyarakat terhadap gerakan Abdul Kahar Muzakkar di berbagai daerah penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan beragam persepsi masyarakat mengenai gerakan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Abdul Kahar Muzakkar

Pada suatu masa dalam sejarah panjang Indonesia, terjadi pemberontakan rakyat di Sulawesi Selatan melawan pemerintah Indonesia. Di wilayah ini, para pemberontak di bawah kepemimpinan Kartosoewirjo bergabung dengan Negara Islam Indonesia. Perlawanan ini dipimpin oleh Kahar Muzakar, seorang pejuang patriotik yang berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Diperkirakan bahwa meletusnya perlawanan di wilayah ini menyebabkan sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara juga melakukan perlawanan pada tahun-tahun berikutnya (Harianto, 2022).

Tempat kelahirannya adalah desa Lanipa di dekat Palopo, Kabupaten Ponrang (Kabupaten Luwu), di pesisir barat laut Teluk Bone. Ia lahir di sana pada tanggal 24 Maret 1921 dengan nama Abdul Kahar Muzakkar. Semasa kecil, ia lebih dikenal dengan nama La Domeng oleh keluarga dan penduduk desa. Ayah Malinrang adalah seorang petani kaya dan termasuk dalam golongan bangsawan rendah. Berkat reputasi dan sumber daya finansial orang tuanya, ia dikirim ke Surakarta pada usia tujuh belas tahun untuk belajar di Sekolah Guru Islam Kweekschool Muhammadiyah dari tahun 1938 hingga 1941 (Mattalioe, 1965).

Selama masa sekolahnya, Kahar Muzakkar dikenal sebagai anak yang cerdas dan ramah. Oleh karena itu, ia sangat aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan organisasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi Islam tersebut. Di antara lainnya, ia merupakan salah satu pemimpin regional

Pemuda Muhammadiyah di Hizbulwathan, gerakan pramuka Muhammadiyah. Ia menjalankan tugas tersebut hingga pasukan fasis Jepang mendarat (Sahajuddin, 2019)

Menurut kepala suku, Kahar Muzakkar telah menghapuskan sistem feodal di Sulawesi Selatan dan menentang aristokrasi. Karena itu, Kahar Muzakkar rela mengambil risiko diusir dari pulau tersebut, atau lebih tepatnya diasingkan seumur hidup. Pada tahun 1943, Kahar Muzakkar kembali ke Surakarta. Di sana, ia memulai kehidupan baru. Bersama istrinya, ia mendirikan perusahaan “Usaha Semangat Muda”. Setelah itu, ia menetap di Jawa.

Kahar Muzakkar adalah seorang pejuang kemerdekaan dari Tanah Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang kontroversial. Berasal dari keluarga pedagang yang berkecukupan dan juga disegani sebagai keluarga pemberani di lingkungan masyarakat.

Persepsi Masyarakat Barru, Soppeng, Wajo Dan Sidrap Terhadap Gerakan Abdul Kahar Muzakkar

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia tidak langsung berada dalam kondisi stabil. Negara yang baru merdeka ini justru harus menghadapi berbagai persoalan, mulai dari ekonomi, sosial, hubungan luar negeri, hingga keamanan. Di bidang pertahanan, muncul sejumlah pemberontakan yang menentang pemerintah Republik Indonesia yang sah. Salah satu yang cukup besar adalah gerakan DI/TII di Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Ia mendirikan Darul Islam pada 7 Agustus 1949 dan membentuk pasukan bernama Tentara Islam Indonesia (TII). Gerakan ini kemudian berkembang dan menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Sulawesi Selatan. Di daerah ini, gerakan DI/TII dipimpin oleh Kahar Muzakkar pada tahun 1950–1965. Kahar sebelumnya dikenal sebagai salah satu pejuang penting dalam masa perang kemerdekaan (1945–1949). Namun, setelah perang berakhir, muncul berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyelesaian kelompok gerilya di Sulawesi Selatan. Situasi ini semakin rumit karena sikap dan tindakan para mantan pejuang, hingga akhirnya melahirkan gerakan DI/TII di bawah kepemimpinan Kahar Muzakkar (Azizah, 2024).

Pada 1 Juli 1950, Kahar Muzakkar mewakili para gerilyawan Sulawesi Selatan bertemu dengan Alex Kawilarang. Dalam pertemuan itu, ia mengajukan permohonan agar sekitar 15.000 gerilyawan dapat diterima menjadi bagian dari Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Namun, permintaan tersebut tidak dikabulkan. Penolakan itu membuat Kahar kecewa dan marah, hingga akhirnya ia menyatakan memutuskan hubungannya dengan TNI. Tidak lama kemudian, tepatnya pada 5 Juli 1950, ia memilih masuk ke hutan dan mulai melakukan perlawanan (Mattalioe, 1994). Tindakan Kahar Muzakkar tersebut membuat pihak militer mengambil langkah tegas. Panglima kemudian mengeluarkan sebuah dekrit yang menyatakan pembubaran KGSS sebagai organisasi gerilya. Dekrit ini dikenal sebagai “Dekrit Kawilarang”, yang pada intinya menyebutkan bahwa KGSS sebagai organisasi di luar APRIS dianggap sudah tidak ada lagi, dan segala upaya untuk menghidupkannya kembali dilarang (Gonggong, 2004). Menanggapi keputusan tersebut, Kahar Muzakkar menunjukkan reaksi yang sangat keras. Ia merasa keputusan itu tidak adil, sehingga dengan penuh emosi ia mencabut tanda pangkatnya sendiri dan melemparkannya di hadapan panglima, sambil mengatakan bahwa pangkat tersebut tidak ada artinya lagi baginya (Druce, 2020).

Kekecewaan Kahar Muzakkar tidak hanya disebabkan oleh fakta bahwa pasukan KGSS-nya tidak diterima ke dalam TNI, tetapi juga karena dirinya sendiri ditolak penunjukannya sebagai komandan Divisi Hasanuddin yang ditempatkan di Sulawesi. Menurut Kahar, Batalyon Hasanuddin seharusnya mencakup semua pejuang yang terlibat dalam revolusi. Namun, pemerintah saat itu tidak menerima semua mantan pejuang kemerdekaan, dengan alasan bahwa hal itu akan melampaui kemampuan keuangan pemerintah. Selain itu, Kahar hanya menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Guru Muhammadiyah di Solo, yang dianggap tidak memadai untuk seorang jenderal

tentara profesional. Alasan lain yang menjadi kekhawatiran adalah sikap antifeodalnya, yang mengarah pada revolusi sosial melawan aristokrasi di Sulawesi Selatan (Harvey, 2008).

Kekuatan utama DI/TII di Sulawesi Selatan sebenarnya berasal dari para mantan pejuang kemerdekaan. Mereka adalah orang-orang yang dulu ikut mempertahankan Indonesia, dan pada awalnya berharap bisa bergabung ke dalam APRIS sebagai bagian dari tentara resmi. Namun setelah pengakuan kedaulatan dan terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) pada Desember 1949, situasi justru memanas, terutama di Makassar yang saat itu merupakan bekas ibu kota Negara Indonesia Timur (NIT). Di sana terjadi pertentangan antara kelompok pendukung negara federal dan pendukung negara kesatuan, serta antara KNIL, TNI, dan Kesatuan Gerilyawan Sulawesi Selatan (KGSS). Para anggota KGSS menuntut agar mereka diterima sebagai bagian dari tentara nasional. Akan tetapi, Panglima Tentara Indonesia Timur, Alex Kawilarang, hanya menerima sebagian kecil dari mereka yang lolos seleksi. Banyak dari mereka tidak diterima karena dianggap tidak memenuhi syarat, seperti tingkat pendidikan dan latar belakang militer yang kurang sesuai (Bakar, 2018)

Pada 7 Agustus 1953, perundingan antara Kahar Muzakkar dan pemerintah mengalami kegagalan. Hal ini membuat Kahar akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan gerakan yang dipimpin Kartosuwiryo dan menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia (NII). Kegagalan tersebut dipengaruhi oleh tidak diterimanya anggota KGSS ke dalam TNI, serta tidak diakuinya kesatuan yang dipimpin Kahar, meskipun mereka juga ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan. Sejak saat itu, Sulawesi Selatan menjadi salah satu basis kuat gerakan DI/TII yang bergabung dengan NII pada tahun 1953. Pengaruhnya kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Sulawesi Selatan.

Pemberontakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan (1950–1965) bermula dari kekecewaan mendalam terhadap pemerintah pusat yang menolak memasukkan pasukan Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) ke dalam APRIS. Konsep *siri'* (harga diri) dalam budaya Bugis-Makassar yang dianggap terluka, ditambah pengaruh ideologi Darul Islam, mendorong Kahar memproklamasikan Sulawesi Selatan sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1953. Sejak saat itu, gerakan bersenjata ini meluas ke berbagai daerah, termasuk Soppeng, Barru, Wajo, dan Sidrap.

Kahar muzakkar di Kabupaten Barru

Sementara itu, di pesisir barat Sulawesi Selatan, daerah Barru yang terletak di jalur strategis antara Makassar dan Parepare juga merasakan getaran pemberontakan Kahar Muzakkar. Barru, dengan karakteristik masyarakatnya yang agamis dan memiliki tradisi perlawanan terhadap ketidakadilan, menjadi salah satu wilayah yang cukup subur bagi bibit-bibit simpati terhadap gerakan DI/TII. Pengaruh Kahar masuk melalui jaringan ulama dan tokoh masyarakat lokal yang terhubung dengan pusat-pusat perlawanan di pegunungan. Pada periode 1957–1960, beberapa desa di Kecamatan Tanete Riaja dan Tanete Rilau dilaporkan menjadi tempat persembunyian pasukan DI/TII yang sedang bertahan dari pengejaran TNI.

Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, masih ada suara-suara masa lalu yang tersimpan rapi dalam ingatan para lansia yang pernah hidup melewati masa-masa sulit sejarah bangsa. Salah satunya adalah Bapak Muh. Tahir, seorang pria berusia 85 tahun asal Desa Lampoko, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Beliau termasuk generasi yang menyaksikan secara langsung bagaimana gelombang pemberontakan Kahar Muzakkar mengguncang kampung halamannya. Meskipun saat itu usianya masih belasan tahun, ingatan tentang pasukan bersenjata yang bergerilya dari hutan ke hutan masih membekas jelas hingga kini.

Dari wawancara dengan Bapak Muh. Tahir, kita bisa melihat bahwa peristiwa sejarah seperti pemberontakan Kahar Muzakkar tidak hanya tersimpan dalam dokumen resmi atau buku-buku teks. Ia juga hidup dalam ingatan rakyat kecil yang merasakan langsung getaran konflik tersebut mulai dari rasa takut, kekerasan, hingga upaya dakwah yang dilakukan dengan cara yang kontroversial. Bagi masyarakat Desa Lampoko, Kabupaten Barru, Kahar Muzakkar bukan sekadar pemberontak atau pahlawan. Ia adalah sebuah kenangan kelim sekaligus bagian dari perjalanan panjang mereka dalam menerima perubahan keyakinan dan menghadapi tekanan zaman.

Kahar Muzakkar di Soppeng

Dari basis perlawanan di Enrekang, pengaruh DI/TII merambat ke Soppeng, khususnya di pedalaman Lalabata dan Donri-Donri, yang menjadi lokasi infiltrasi dan pertempuran kecil antara TNI dan pasukan Kahar. Adapun hasil wawancara yang didapatkan dari salah satu narasumber asal soppeng yang masih menyimpan kenangan terkait Kahar Muzakkar.

Kakek Sudarmi merupakan seorang informan dalam wawancara mengenai sejarah Kahar Muzakkar di Kabupaten Soppeng. Ia adalah seorang laki-laki berusia 76 tahun yang saat ini sudah tidak lagi bekerja karena faktor usia. Meskipun demikian, pengalaman hidup dan ingatannya tentang peristiwa masa lalu masih cukup kuat, walaupun dalam penyampaiannya terkadang terkendala oleh bahasa dan kondisi fisiknya yang sudah lanjut usia.

Kakek Sudarmi tinggal di Desa Lacokkong, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Sebagai seseorang yang pernah mengalami langsung situasi pada masa gerakan Kahar Muzakkar, ia menjadi sumber informasi yang penting untuk memahami kondisi sosial masyarakat pada waktu itu, terutama dari sudut pandang masyarakat biasa di kampung.

Dalam wawancara tersebut, Kakek Sudarmi menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat langsung dalam gerakan Kahar Muzakkar. Hal ini disebabkan karena pada masa terjadinya peristiwa tersebut, ia masih berusia anak-anak. Namun, meskipun tidak terlibat, ia tetap memiliki pengalaman langsung terkait situasi yang terjadi di lingkungannya saat itu.

Ia mengingat dengan jelas suasana mencekam ketika pasukan tentara datang ke kampungnya. Pada saat itu, ia bersama warga lainnya terpaksa melarikan diri dan bersembunyi di pegunungan demi menyelamatkan diri. Peristiwa tersebut meninggalkan kesan mendalam baginya, karena rasa takut dan ketidakpastian yang dirasakan masyarakat begitu kuat.

Terkait sosok Kahar Muzakkar sendiri, Kakek Sudarmi mengaku bahwa ia tidak pernah melihatnya secara langsung. Ia hanya mengetahui keberadaan pasukan batalion yang datang ke kampung, sementara Kahar Muzakkar dianggap sebagai figur yang tidak mudah dijumpai oleh masyarakat umum. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara pemimpin gerakan dengan masyarakat di tingkat lokal.

Lebih lanjut, Kakek Sudarmi menjelaskan bahwa sikap masyarakat terhadap gerakan Kahar Muzakkar pada saat itu tidaklah seragam. Sebagian masyarakat memilih bersikap netral demi menjaga keselamatan diri mereka. Ada pula yang mendukung, terutama karena gerakan tersebut dikaitkan dengan penyebaran ajaran Islam. Namun, tidak sedikit juga yang menolak karena merasa takut terhadap dampak yang ditimbulkan, terutama terkait kondisi keamanan yang tidak stabil.

Setelah situasi mulai mereda dan pasukan tentara meninggalkan wilayah tersebut, warga yang sebelumnya mengungsi di pegunungan, termasuk Kakek Sudarmi, perlahan kembali ke kampung mereka. Pengalaman tersebut menjadi bagian penting dari ingatan kolektif masyarakat setempat, yang mencerminkan bagaimana sebuah konflik dapat memengaruhi kehidupan sosial dan rasa aman masyarakat secara langsung.

Kahar muzakkar di Kabupaten Wajo

Sebagai kerajaan Bugis yang religius, Wajo (terutama Belawa, Majauleng, dan Gilireng) memberikan dukungan signifikan terhadap gerakan Kahar karena kuatnya nilai *siri'* dan banyaknya mantan anggota KGSS dari daerah ini. Salah satu informan asal wajo yang berhasil kami wawancarai bernama ibu Naheriah.

Ibu Naheriah, seorang perempuan berusia 80 tahun yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, merupakan salah satu saksi tidak langsung dari masa pergerakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Kini beliau bertempat tinggal di Bottodongga, namun masa kecil hingga remajanya dihabiskan di kampung halamannya, Kaluku Sifongge, Kabupaten Wajo. Pada waktu gerakan Kahar Muzakkar berlangsung, Ibu Naheriah masih berusia remaja. Meskipun usianya sudah lanjut, ingatannya tentang peristiwa tersebut masih cukup jelas, terutama mengenai situasi kampung, interaksi dengan pasukan yang disebut "gorilla", serta pengalamannya ketika terjadi pertempuran antara TNI dan pasukan Kahar Muzakkar.

Menurut pengakuan Ibu Naheriah, masyarakat di kampungnya lebih sering menyebut kelompok Kahar Muzakkar dengan istilah "gorilla" daripada DI/TII. Ia sendiri tidak mengetahui secara pasti asal-usul penggunaan istilah tersebut, tetapi sejak dulu hanya itulah sebutan yang ia dengar. Meskipun ada anggota keluarganya yang ikut dalam gerakan tersebut (kini telah meninggal), Ibu Naheriah mengatakan bahwa orang tersebut ikut secara sukarela tanpa paksaan.

Ibu Naheriah tidak pernah melihat langsung wajah Kahar Muzakkar karena tokoh tersebut tidak pernah datang ke kampungnya. Ketika pasukan "gorilla" datang, mereka tidak mengumpulkan warga atau mengadakan pertemuan. Mereka hanya meminta untuk dimasakkan dan diberi makanan. Terkait tokoh lokal Andi Sose dan Andi Selle, Ibu Naheriah mengaku tidak mengetahui hubungan mereka dengan Kahar Muzakkar, termasuk tidak pernah mendengar cerita tentang pertemuan di Bone Pute atau Siwa.

Sikap masyarakat kampung pada waktu itu cenderung netral. Di sekitar kampung sering terjadi pertempuran antara TNI dan pasukan Kahar Muzakkar, namun hanya berlangsung sebentar karena pasukan Kahar membawa amunisi yang sedikit dibandingkan TNI. Ibu Naheriah tidak melihat langsung pertempuran, hanya mendengar suara ledakan. Ketika terjadi pertempuran, ia dan warga lainnya lari masuk ke hutan untuk bersembunyi.

Kelompok "gorilla" berusaha merusak Jembatan Tarumpakkae, namun tidak berhasil karena ketika TNI datang mereka segera melarikan diri. Peristiwa yang paling membekas adalah tindakan pembakaran yang dilakukan oleh TNI terhadap satu kampung; seluruh rumah habis dibakar tanpa tersisa. Akhir gerakan Kahar Muzakkar di wilayah tersebut diketahui setelah TNI mengambil alih Kampung Jalang, dan sejak itu kabar tentang gerakan tersebut tidak pernah terdengar lagi.

Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa di Kaluku Sifongge, masyarakat lebih akrab dengan sebutan "gorilla" untuk kelompok Kahar Muzakkar. Kehadiran pasukan tersebut hanya terbatas pada permintaan makanan, tanpa pengumpulan massa atau pertemuan. Masyarakat bersikap netral. Pertempuran berlangsung singkat karena keterbatasan amunisi pihak Kahar Muzakkar. Upaya perusakan Jembatan Tarumpakkae gagal, dan dampak paling berat adalah pembakaran seluruh kampung oleh TNI. Berakhirnya gerakan di wilayah itu ditandai dengan dikuasainya Kampung Jalang oleh TNI.

Kahar muzakkar di Kabupaten Sidrap

Tidak jauh dari Wajo, daerah Sidrap (Sidenreng Rappang) yang terdiri dari dataran rendah dan lahan pertanian yang subur juga tidak luput dari bayang-bayang pemberontakan Kahar Muzakkar. Sidrap, yang merupakan wilayah lintasan strategis antara pedalaman dan pesisir, sering digunakan

oleh pasukan DI/TII sebagai jalur logistik dan tempat persinggahan sementara sebelum bergerak menuju basis-basis perlawanan di Enrekang dan Latimojong. Kecamatan-kecamatan seperti Panca Rijang, Maritengngae, dan Watang Pulu tercatat dalam laporan-laporan militer sebagai daerah yang rawan infiltrasi pemberontak pada periode 1958–1963. Salah satu informannya yaitu Andi Ida.

Andi Ida, seorang perempuan berusia 51 tahun yang berprofesi sebagai pedagang. Wawancara ini bertujuan untuk menggali ingatan masyarakat terkait peristiwa yang melibatkan tokoh Abdul Kahar Muzakkar, khususnya bagaimana tokoh tersebut dipahami dan diceritakan secara turun-temurun di lingkungan masyarakat.

Dalam proses wawancara, terlihat bahwa pengetahuan informan mengenai Abdul Kahar Muzakkar tidak berasal dari pengalaman langsung, melainkan dari cerita orang tua dan lingkungan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa ingatan kolektif masyarakat sering kali diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Informan menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam gerakan yang berkaitan dengan tokoh tersebut, namun ia mengenal nama Abdul Kahar Muzakkar sebagai sosok pejuang yang pernah diceritakan oleh orang tuanya.

Menurut penuturan informan, Abdul Kahar Muzakkar dikenal sebagai seorang tokoh yang berasal dari wilayah Luwu. Dalam ingatan yang disampaikan oleh orang tuanya, ia digambarkan sebagai sosok yang memiliki semangat perjuangan dan kesetiaan terhadap Indonesia. Namun, di sisi lain, terdapat pula pandangan yang berbeda mengenai dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap tokoh sejarah tidak selalu tunggal, melainkan bisa beragam tergantung pada sudut pandang masing-masing individu maupun kelompok.

Ketika ditanyakan mengenai keberadaan Abdul Kahar Muzakkar di kampung tempat tinggal informan, ia menyatakan bahwa tokoh tersebut tidak pernah secara langsung datang ke wilayahnya. Namun demikian, ia pernah mendengar cerita bahwa di beberapa daerah, khususnya di wilayah Luwu, pernah terjadi kekurangan bahan makanan pada masa tersebut. Dalam situasi seperti itu, muncul cerita bahwa kelompok Abdul Kahar Muzakkar mengambil bahan makanan seperti beras, ayam, dan kebutuhan lainnya dari masyarakat. Akan tetapi, informan juga menekankan bahwa tidak semua tindakan tersebut dipandang negatif, karena ada sebagian masyarakat yang memberikan bantuan secara sukarela.

Hal ini memperlihatkan bahwa dalam kondisi sosial tertentu, tindakan yang dilakukan oleh suatu kelompok dapat ditafsirkan secara berbeda oleh masyarakat. Ada yang melihatnya sebagai bentuk tekanan atau pemaksaan, tetapi ada pula yang menganggapnya sebagai bagian dari perjuangan yang membutuhkan dukungan bersama. Perbedaan penafsiran ini menjadi bukti bahwa sejarah tidak selalu hitam-putih, melainkan penuh dengan nuansa dan kompleksitas.

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa masyarakat memiliki dua pandangan utama terhadap Abdul Kahar Muzakkar. Di satu sisi, ada yang menganggapnya sebagai pemberontak yang menentang pemerintah. Di sisi lain, ada pula yang melihatnya sebagai seorang pejuang yang memiliki tujuan tertentu dalam memperjuangkan nilai-nilai yang diyakininya. Perbedaan pandangan ini mencerminkan adanya dinamika sosial dan politik yang memengaruhi cara masyarakat memahami suatu peristiwa sejarah.

Selain itu, informan juga menyampaikan bahwa dalam cerita yang ia dengar, Abdul Kahar Muzakkar dikaitkan dengan gerakan Islam. Ia disebut-sebut sebagai salah satu tokoh yang memiliki peran dalam memperjuangkan nilai-nilai keislaman. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian masyarakat memberikan dukungan kepadanya, terutama dari kalangan yang memiliki kesamaan pandangan ideologis.

KESIMPULAN

Gerakan Abdul Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan tidak hanya didorong oleh ideologi keagamaan, tetapi terutama oleh kekecewaan mendalam terhadap pemerintah pusat yang menolak untuk memasukkan pasukan Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) ke dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (APRIS) dan tidak memberinya jabatan Komandan Divisi Hasanuddin. Pada tanggal 7 Agustus 1953, Kahar mendeklarasikan Sulawesi Selatan sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia dan mendirikan markas besar di Baraka, Enrekang, dengan struktur pasukan yang terbagi menjadi lima batalion.

Gerakan ini meninggalkan dampak sosial yang mendalam di wilayah Barru, Soppeng, Wajo, dan Sidrap. Barru berkembang menjadi rute strategis dan tempat persembunyian bagi pasukan. Soppeng terjadi pertempuran-pertempuran kecil, dan penduduk berbondong-bondong mengungsi ke pegunungan. Wajo menunjukkan dukungan yang kuat meskipun penduduknya cenderung bersikap netral. Sementara Sidrap berfungsi sebagai rute logistik dan persinggahan bagi pasukan. Penduduk sipil secara langsung mengalami ketakutan, pembakaran desa oleh TNI, serta ketidakamanan, sebagaimana dicatat dalam kenangan para informan.

Persepsi publik terhadap Kahar Muzakkar beragam sebagian menganggapnya sebagai pemberontak negara, sementara yang lain memandangnya sebagai pejuang regional yang memperjuangkan keadilan dan nilai-nilai Islam. Gerakan ini berhasil dihancurkan melalui berbagai operasi militer, negosiasi, dan amnesti. Kahar Muzakkar tewas pada tanggal 1 Februari 1965 dalam baku tembak di Sungai Lasolo, Sulawesi Tenggara. Namun, kenangannya tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat di empat wilayah tersebut dan diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Hal ini membuktikan bahwa sejarah tidak hanya terabadikan dalam dokumen resmi, tetapi juga dalam pengalaman orang-orang biasa.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah. (1990). *Sejarah lokal di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Abdullah. (1997). *Islam dan masyarakat: Pantulan sejarah Indonesia*. LP3ES.
- Amini, M. (2024). Abdul Kahar Muzakkar: Perjalanan Intelektual Dan Aktivitas Politik-Kultural, 1930-An–1970-An. *Mozaik Kajian Islam Sejarah*, 92-100.
- Andaya, L. Y. (1981). *The heritage of Arung Palakka*. Martinus Nijhoff.
- Azizah, N. (2024). Life of Women in South Sulawesi during the Kahar Muzakkar Rebellion, 1953-1965. *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*.
- Bakar, A. (2018). Konsepsi Ketatanegaraan Kahar Muzakkar. *AL-DAULAH: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 51-75.
- Crouch, H. (1978). *The army and politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Druce. (2020). A South Sulawesi hero and villain: Qahhar Mudzakkar (Kahar Muzakkar) and his legacy. *International Journal of Asia Pacific Studies*.
- Druce, S. C. (2020). A South Sulawesi hero and villain: Qahhar Mudzakkar and his legacy. *International Journal of Asia Pacific Studies*, 16(2), 151–179.

- Gonggong, A. (2004). *Abdul Qahhar Muzakkar Dari Patriot Hingga Pemebrontak*.
- Hamid, A. (2004). *Jejak perjuangan Kahar Muzakkar*. Pustaka Refleksi.
- Harianto. (2022). Perlawanan DI/TII Terhadap Negara (Studi Terhadap Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan). *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*,, 101-110.
- Harvey, B. S. (2008). *Pemberontakan Kahar Muzakkar: dari tradisi ke DI/TII*. Universitas Michigan: Grafitipers.
- Kahin, G. M. (1952). *Nationalism and revolution in Indonesia*. Cornell University Press.
- Mattalioe. (1965). *Kahar Muzakkar dan Petualangannya*. Jakarta: Delegasi.
- Nasution, A. H. (1983). *Memenuhi panggilan tugas*. Jakarta: Gunung Agung.
- Noer. (1987). *Partai Islam di pentas nasional*. Jakarta: Grafiti Press.
- Pelras. (1996). *The Bugis*. Oxford: Blackwell Publisher.
- Rasjid, S. (1999). *Islam dan pemberontakan di Sulawesi Selatan*. Hasanuddin University Press.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia modern 1200–2008*. Jakarta: Serambi.
- Sahajuddin. (2019). Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan dalam Kajian Sumber Sejarah Lisan 1950-1965 (DI/TII Movements in South Sulawesi the Study Oral History Sources of 1950-1965). *Seminar Series in Humanities and Social Sciences*.